

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

DOMINIKA

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
e-mail : Dominika_mini@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dominika : Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. **Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.** Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut yang belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan model pendekatan Kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan subyek dalam penelitian ini adalah pemerintah yakni pihak Kelurahan Benua Melayu Laut selaku pihak implementor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi program beras miskin ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari kurang maksimalnya implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut di pengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang pertama, berupa Komunikasi kurang diadakannya sosialisasi yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai raskin sangat minim. Kedua, faktor sumber daya dalam hal ini kurang memadainya fasilitas sumber daya di dalam implementasi program raskin. Ketiga, sikap implementor yang kurang mendukung dan kurang merespon terhadap permasalahan yang ada didalam implementasi program raskin ini menyebabkan program raskin yang dijalankan tidak berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : implementasi, program, beras miskin (raskin), komunikasi, sumberdaya, dan disposisi.

ABSTRACT

Dominika: Implementation of Beras Miskin (Raskin) Program in Benua Melayu Laut Village, Southern District of Pontianak, Pontianak City. **Thesis. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.** The purpose of this study is to describe and analyze what factors are causing the Beras Miskin (Raskin) Program implementation in Benua Melayu Laut Village which has not done well. This study used a qualitative approach models. This research used descriptive method, with the subjects in this study is the government of Benua Melayu Village as the implementor and the people involved in the implementation of this Raskin Program. Interview, observation, and documentation was used for data collection. The results of this study indicate that the implementation of the Raskin Program in Benua Melayu Laut Village is not optimal and influenced by several factors, the first factor, a less communication socialization that leads to a lack of public understanding about Raskin. Secondly, resource factor in this case the lack of adequate facilities in the resource Raskin program implementation. Third, the implementor unfavorable attitudes and less responsive to the existing problems in the implementation of this program led to Raskin program is not running optimally.

Keyword : Implementation, Program, Beras Miskin (Raskin), Communication, Resources, and Disposition.

2. Tepat jumlah, jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
3. Tepat harga; harga beras yang dibayar keluarga sasaran penerima manfaat sebesar Rp.1.600,-/Kg netto di titik distribusi.
4. Tepat waktu; waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS sesuai dengan rencana penyaluran.
5. Tepat administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Tepat kualitas; terpenuhinya kualitas beras yang sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin, salah satunya di Kelurahan Benua Melayu Laut. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut antara lain. **Pertama**, kurang komunikasi berupa kurangnya diadakannya sosialisasi yang menyebabkan kurangnya pemahaman dari masyarakatnya mengenai program raskin tersebut dan bersikap tidak peduli. **Kedua**, akurasi Data Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Benua Melayu Laut belum sepenuhnya akurat sehingga banyak penduduk miskin yang tidak terdata. Banyak masyarakat miskin yang berhak menerima raskin dikarenakan tidak masuk didalam data yang ada didalam penerima raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut. **Ketiga**, sikap Implementor yang dirasakan kurang mendukung didalam implementasi program raskin, dengan sikap yang kurang peduli (acuh tak acuh) menanggapi keluhan-keluhan dari pihak masyarakat miskin yang menerima jatah raskin dan masyarakat yang tidak mendapatkan jatah raskin, menyebabkan program raskin yang dijalankan di

Kelurahan Benua Melayu Laut tidak dapat berjalan baik dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Wilayah kerja pemerintah Kelurahan Benua Melayu Laut memiliki luas wilayah 56 Ha/0,58 km dengan batas wilayah disebelah Utara Sungai Kapuas, sebelah Selatan Kel. BMD Kec. Pontianak Selatan, sebelah Barat Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, sebelah Timur Kel. Bansir Laut Kec. Tenggara. Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh peneliti dilapangan, bahwa penduduk Kelurahan Benua Melayu Laut Tahun 2013-2014 sesuai dengan monografi persemesternya, jumlah seluruh Kepala Keluarga 2.827 jiwa. Jumlah penduduk miskin 215 KK. Dengan jumlah penduduk miskin yang masuk kriteria penerima manfaat Program Raskin (menurut Standar BPS) yaitu 146 KK.

Fenomena yang terjadi di atas mengindikasikan bahwa implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak belum terlaksana dengan baik. Maka dapat dikatakan bahwa program yang bagus belum tentu berhasil jika pada tahapan implementasi ditemukan kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk terus meningkatkan apa saja yang menjadi tujuan utama dari program raskin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi program raskin dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan alasan urgensinya masalah tersebut".

2. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah penelitian tersebut ialah "Implementasi program Beras Miskin (RASKIN) di

Kelurahan Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak".

3. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas adalah :

Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Benua Melayu laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak belum terlaksana dengan baik?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang belum terlaksanakan dengan baik.

5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini dapat menambah pemahaman berupa ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan Implementasi Kebijakan mengenai Program Beras Miskin (Raskin).

b. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintahan sebagai pelaksana program dari pendistribusian raskin bagi masyarakat miskin di setiap tahunnya di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak khususnya tentang

Implementasi Program Raskin dan menyadari betapa pentingnya raskin bagi kehidupan masyarakat miskin untuk mensejahterakan kehidupan. Dan bagi pemerintah terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan alternatif dan masukan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan sehingga dapat menjadi alat monitor bagi pelaksanaan selanjutnya.

2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis melalui karya ilmiah, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Untan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi Kantor Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process sekaligus studi yang sangat crucial). Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik,

tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Model yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini ialah Model implementasi Edward III (dalam Widodo, 2008:96), agar kebijakan berjalan lancar, sangat tergantung pada model proses Implementasi kebijakan disuatu program. Implementasi kebijakan model George Edward III (dalam Leo Agustino,2006:148), terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut terdapat empat variabel. diantaranya peneliti menggunakan tiga variabel tersebut, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. disposisi

George Edward III, (dalam Leo Agustino,2006:150-151) juga menjelaskan bahwa :

1. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Faktor Sumber daya (*resources*)

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2008 : 98) bagaimana kejelasan dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagai mana yang telah disebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas (gedung, peralatan, tanah, transportasi dan suku cadang lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi (*disposition*)

Edward III (dalam Subarsono, 2010:91) menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut dapat berupa komitmen, kejujuran serta sifat demokratis. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila sikap atau perspektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan maka proses implementasi tidak dapat terlaksana efektif.

Disposisi merupakan sikap, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang sedang diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Implementasi kebijakan ini dapat terlaksanakan dengan baik apabila dari setiap *stakeholders* yang terlibat mempunyai tanggungjawab untuk

melaksanakannya dengan baik, serta tersedianya unsur-unsur pendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam implementasi program pendistribusian raskin tersebut, harus melewati tahapan, dimulai dari pendataan hingga pendistribusian beras miskin kepada keluarga yang menjadi penerima dari program Raskin.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif, Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya atas fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat. Dengan analisis data secara kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Lokasi penelitian ialah Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Subjek penelitian ialah Lurah sebagai Kepala Kantor, Sekretaris Lurah, Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Ketua RT, Satuan Kerja Raskin Kelurahan Benua Melayu Laut, Masyarakat yang tidak mendapatkan jatah raskin untuk diperoleh informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Raskin adalah sebuah program yang dirancang oleh pemerintah, program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin melalui distribusi beras murah. Sasaran program raskin 2013 adalah Rumah Tangga Miskin (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS tahun 2012 yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga hampir miskin dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp.1.600,-/kg Netto di titik distribusi. Program ini mencakup seluruh propinsi, sementara tanggung

jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan/Desa dipegang oleh Perum BULOG.

Raskin merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan dalam bentuk beras untuk seluruh daerah di Indonesia. Kelurahan Benua Melayu Laut merupakan salah satu kelurahan yang ada di Indonesia tepatnya terletak di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang melaksanakan program raskin. Program raskin diharapkan mampu untuk membantu masyarakat miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk beras murah.

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan sejak tahun 1997. Dalam pelaksanaannya, di tingkat Kelurahan, Kantor Kelurahan merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam mengimplementasikan Program Raskin bagi masyarakat miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut hingga sampai sekarang.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan selama penelitian. Program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak penduduk miskin yang seharusnya mendapatkan raskin tetapi tidak mendapatkan raskin dikarenakan penduduk miskin tersebut tidak termasuk didalam data penduduk yang penerima raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut. Dari hasil observasi peneliti di lapangan dalam Pendistribusian Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Benua Melayu Laut masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemerintah melalui Program raskin berharap, dapat menekan peningkatan proporsi penduduk miskin. Namun, tingkat kemiskinan akan semakin

tinggi jika tingkat ketepatan semakin rendah. Sementara itu masalah ketepatan sasaran sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penentuan/identifikasi sasaran. Mengingat sasaran program adalah rumah tangga miskin, kriteria dan mekanisme penentuan atau pengukuran kemiskinan menjadi sangat penting, walaupun konsep dan pengukuran kemiskinan itu sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa masyarakat Benua Melayu laut mayoritas mata pencahariannya adalah pedagang dan buruh. Hasil observasi peneliti juga tidak adanya pelaksanaan sosialisasi tentang program raskin ini dikeluarkan di Kelurahan Benua Melayu Laut. Didalam penelitian ini juga penulis melakukan wawacara terhadap subyek penelitian yang dianggap tahu tentang permasalahan yang diteliti.

Di Kelurahan Benua Melayu Laut penduduk yang menerima jatah raskin sejumlah 146 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima raskin. Dalam kenyataannya dilapangan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut seharusnya lebih dari 146 RTS. Masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdata sehingga tidak mendapatkan raskin.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut pada pembahasan ini penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Raskin Di Kelurahan Benua Melayu Laut dengan mengidentifikasi faktor-faktor model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George C. Edwards III.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Beras Miskin (Raskin).

1. Komunikasi

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, salah satu penentu utama dari suatu keberhasilan

adalah komunikasi. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Dengan adanya komunikasi yang baik antara yang membuat kebijakan dengan target atau sasaran dari kebijakan publik tersebut. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Melihat hal ini, harus adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Tujuan dengan diadakannya sosialisasi tersebut adalah menyampaikan informasi tentang program Raskin kepada pihak masyarakat. Maka dari itu sosialisasi harus dilakukan dari Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Dusun, secara berjenjang dan berkesinambungan. Prinsipnya adalah peserta sosialisasi di tingkat yang paling atas akan menjadi fasilitator pada kegiatan sosialisasi ditingkat bawah.

Pelaksana Distribusi adalah Kelurahan dibantu oleh aparat bawahannya serta wakil masyarakat apabila diperlukan yang bertugas mendistribusikan Raskin kepada penerima manfaat. Penerima Manfaat adalah dari keluarga/masyarakat miskin di Kelurahan yang berhak menerima beras raskin ditentukan berdasarkan data BPS.

Agar pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan tepat pada sasaran, perlu dilakukan penjelasan atau sosialisasi apakah program Raskin tersebut, bagaimana prosedurnya, siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima beras miskin (Raskin), dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses implementasi program bantuan beras miskin (Raskin) di Kelurahan Benua Melayu Laut, pelaksanaan sosialisasi sangat jarang dilakukan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai Raskin sangat minim, bahkan banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui mengenai Raskin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan sosialisasi tentang Raskin.

2. Sumber Daya

Faktor kedua dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu mengenai sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Faktor sumber daya menjadi faktor yang sangat penting sebagai tolak ukur bagi keberhasilan suatu kebijakan, karena kita ketahui bahwa pengimplementasian suatu kebijakan tidak lepas dari bagaimana kita memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program. Dalam pengimplementasian kebijakan sumber daya manusia merupakan kunci bagi

diselenggaranya suatu kebijakan karena manusia berada diposisi sebagai pengolah kebijakan dan merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi program.

Dalam pelaksana implementasi program beras miskin bagi masyarakat miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya keterbatasan sumber daya yang didapat. Dalam hal ini yang di maksud dengan sumber daya dalam implementasi program beras miskin bagi masyarakat miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut adalah sumber daya dari beras miskin itu sendiri dalam kualitas beras miskin dan tidak kurang tepat sasaran kepada masyarakat yang menerima Raskin. Masih terdapat beberapa masalah yang menjadi salah satunya masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan hak sebagai penerima Raskin, sedangkan masyarakat yang diatas ekonominya baik masih menerima. Masih ada masalah yang lain, masyarakat yang menerima beras miskin terkadang mendapatkan beras miskin yang tidak layak di konsumsi dan masalah lainnya lagi masih ada beberapa masyarakat yang benar-benar miskin tidak dapat mengambil beras miskin sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan alasan belum ada biaya dan transportasi untuk menempuh jarak dari rumah ke Kelurahan Benua Melayu Laut tersebut.

3. Disposisi.

Edward III (dalam Subarsono, 2010:91) menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut dapat berupa komitmen, kejujuran serta sifat demokratis. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila

sikap atau perspektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan maka proses implementasi tidak dapat terlaksana efektif.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi raskin, keseriusan sikap implementor dirasakan sangat kurang. Hal tersebut dirasakan dengan kurangnya keseriusan implementor dalam hal ini BPS yang bertugas didalam pelaksanaan pendataan warga miskin. Dalam pelaksanaan implementasi raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut banyak masyarakat miskin yang berhak mendapatkan raskin tidak mendapatkan raskin dikarenakan tidak terdata didalam jumlah penerima raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut.

Implementor yang menguasai substansi kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam beberapa hal, protes masyarakat masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi, salah satunya adalah mengenai waktu dan pendataan.

Salah satu bentuk protes masyarakat dalam pendataan yang tidak maksimal tidak menampakkan tanggapan dari petugas pendataan. Dalam pelaksanaan implementasi program raskin, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. Disposisi implementor tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kebijakan yang dijalankan. Jika dikaji kembali mengenai pengetahuan dan pemahaman implementor, pada umumnya implementor telah mengetahui substansi dari kebijakan yang dijalankan, namun ternyata hanya dengan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan yang dijalankan tidak cukup untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik. Karakteristik implementor berupa komitmen tidak ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan implementasi, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen dari implementor dalam hal

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga muncul ketidakpedulian implementor terhadap masyarakat miskin yang tidak terdata.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut belum berhasil, adapun faktor-faktor yang dimaksud diantaranya yaitu:

1. Komunikasi

Dalam mensosialisasikan sebuah kebijakan tentunya harus melalui koordinasi dengan pihak terkait akar dalam pelaksanaannya tidak mendapat kesulitan sehingga kebijakan yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program beras miskin (raskin) adalah kurangnya diadakannya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengenai pemahaman tentang program beras miskin (raskin) dan bersikap tidak peduli.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan tepat sasaran. Dalam hal ini, sumber daya di Kelurahan Benua Melayu Laut masih terbelang beras tidak tepat kualitas karena beras yang biasa didapatkan oleh masyarakat masih ada yang hancur dan berketu, sehingga terjadi ketidaknyamanan masyarakat miskin tersebut untuk mengkonsumsi beras miskin yang ada. Dan masih terdapat masyarakat miskin yang benar-benar memerlukan raskin tersebut malah tidak mendapatkan

jatahnya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendistribusian beras tidak tepat sasaran dan tidak tepat kualitas.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan dalam proses implementasi program Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini pihak implementor Perum Bulog mengenai masalah di dalam implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut, dalam hal ini masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima raskin mengakibatkan sikap pelaksana di Kelurahan dalam menjalankan tugasnya sehingga akan memungkinkan pihak Kelurahan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Banyak kritikan dan masukan dari masyarakat mengenai sikap implementor di dalam melaksanakan tugasnya dan kesan dari sikap implementor pun tidak peduli (acuh tak acuh) terhadap tanggapan masyarakat.

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti merasa sangat perlu untuk memberikan masukan agar kedepannya proses implementasi program beras miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pemberitahuan mengenai program raskin kepada masyarakat perlu diadakannya sosialisasi secara konsisten mengenai program raskin sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai program raskin serta mengetahui hak mereka untuk memperoleh raskin.
2. Sumber daya yang masih kurang memadai harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah,

karena setiap pelaksanaan implementasi program beras miskin (Raskin) harus didukung oleh sumber daya yang memadai pula. Sumber daya harus memadai secara kualitas dan tepat sasaran, sehingga penambahan sumber daya manusia harus dikaji dari dua sisi tersebut. Faktor yang mempengaruhi dalam sumber daya adalah sumber daya manusia yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin.

3. Perlu ditingkatkan sikap implementor dalam implementasi program raskin sehingga di dalam implementasi masalah-masalah yang terjadi pada implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut dapat terselesaikan. Para pelaksana beras raskin terutama mereka yang melakukan survey terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan beras raskin sebaiknya lebih meningkatkan tugasnya di dalam pendataan yang secara lebih detail lagi sehingga sasaran dari program raskin dapat jelas dan tepat dengan bekerja sama melibatkan para RT/RW dalam pendataan warga miskin yang berhak menerima raskin.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:
- Alfabeta. Anonim. 1993. *Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Deptan RI.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung:
- Refika Adiatama, Arifin, Zaenal. 1998. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.

- Bungin Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Prenada Media Group.
- Irfan Islamy. 1984. *Prinsi-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Leo, Agustino. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mahmoedin, H.As. 1995. *Etiket Pelayanan Bank*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moenir, H.A. S. 1990. *Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Pembinaan Kepegawalan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : IKAPI.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarwan Danim. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- , 2008 . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- , 2011. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- , 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Rafika Adilama
- , 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bogor: Alfabeta
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tohardi, A. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Malang : Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Skripsi dan Tesis**
- Kusumawardhani, Dwi Astrida. 2008. "*Studi Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Banusari Semarang*". (Skripsi). Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Musawa, Mariyam. 2009. "*Studi Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang*". (Skripsi). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

*Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Tahun 2011*

Peraturan Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Kebijakan Perberasan.

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat Republik Indonesia. Tahun 2011. *Pedoman
Umum Raskin.*

Sumber dari Internet

Bulog.co.id. 2012. *Sekilas RASKIN (Beras untuk
Rakyat Miskin).* Melalui
<[http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2
.php](http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php)> (2/802).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : DOMINIKA
NIM / Periode Lulus : E42010020 / 2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU PEMERINTAHAN
Email address/HP : Dominika_mini@yahoo.co.id / 085753211996

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BRNUA
MELAYU LAUT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014


(DOMINIKA)